



Bupati Landak Protes ke Bappenas

Landak Tak Dapat Bantuan Pertanian

NGABANG – Bupati Landak Karolin Margret Natasa mempertanyakan kepada Bappenas RI tentang tidak ada lagi bantuan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, karena bantuan tersebut hanya diberikan pada daerah-daerah yang ditetapkan sebagai daerah Food Estate atau Perkampungan Industri Pangan.

Hal tersebut dikatakannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 di Balai

Petiti Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (7/4).

“Menteri Pertanian menetapkan daerah-daerah Food Estate dan untuk Regional Kalimantan itu ditetapkan di Kalimantan Tengah, penetapan food estate sendiri kami harap tidak menghambat bantuan pemerintah pusat untuk daerah-daerah diluar food estate. Karena pertanian itu ada diberbagai wilayah, dan disetiap wilayah itu sebenarnya ada sentra-sentra ketahanan pangan seperti di Kabupaten Landak dan Sambas ini merupakan sentra ketahanan pangan untuk Kalimantan

Barat,” ucap Karolin.

Bupati Karolin menjelaskan bahwa dari sisi kepentingan strategis nasional Kabupaten Landak maupun Provinsi Kalimantan Barat tidak ditetapkan sebagai project food estate, sehingga Bupati Landak protes kepada menteri pertanian karena tidak ada lagi bantuan untuk daerah-daerah yang tidak ditetapkan sebagai daerah food estate.

“Mulai tahun ini skema Dana Alokasi Khusus (DAK) dan tugas perbantuan dibidang pertanian itu nol atau tidak ada. Nah itu yang kami pertanyakan kepada Bappenas, dan menurut info dari Bappenas ada skema pembiayaan lain dari pemerintah pusat, tetapi ini belum ada sosialisasi kepada pemerintah daerah,” terang Karolin.

Saat sesi tanya jawab Bupati Karolin meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian dapat melakukan koordinasi, sinkronisasi dan regulasi dengan Bappenas terkait bantuan dibidang pertanian dari pemerintah pusat. Bupati Landak tidak mempersalahkan adanya prioritas nasional terkait program food estate yang dinilai untuk ke-

pentingan yang lebih besar.

“Pertanyaan Saya, Kami yang ada di daerah ini terkait bantuan pemerintah pusat bidang pertanian jadinya bagaimana? Kami tidak mendapatkan apa-apa pembangunan dari pusat berkaitan dengan bidang pertanian. Suka-sukanya menteri menetapkan tiga daerah food estate kemudian daerah lain tidak mendapatkan dana pembangunan dibidang pertanian, kami berharap regulasi ini disosialisasikan dengan jelas kepada Kami,” ungkap Karolin saat sesi tanya jawab musrenbang.

Saat memberikan tanggapan Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas RI Slamet Soedarsono menerangkan bahwa usulan dan pertanyaan dari Musrenbang Kalimantan Barat tersebut bisa menjadi usulan pada Musrenbang Nasional.

“Ini menjadi salah satu output dalam musrenbang kali ini, jadi nanti masih ada tahapan untuk musrenbang nasional, hal ini nanti akan menjadi masukan yang penting untuk dibahas pada kesempatan berikutnya,” kata Slamet Soedarsono. (mif)



HUMAS KAB FOR PONTIANAK POST

MUSRENBANG: Bupati Landak Karolin Margret Natasa menyampaikan keluhannya saat Musrenbang RKPD Kalbar 2023, Kamis (7/4).